



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6272-6280

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kritis Politis Pendidikan di Indonesia

Widiastuti^{1✉}, Ismira²

Universitas Azdkia

Email: widiastutizakia@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Namun pada kenyataanya politis pendidikan banyak terjadi penyelewengan oleh beberapa oknum yang terlibat sehingga berdampak buruk kepada pendidikan di Indonesia. Untuk melihat lebih lanjut kenapa terjadinya politisi pendidikan di Indonesia maka peneliti tertarik melakukan penelitian wacana untuk menjabarkan lebih lajut tentang politisi pendidikan di Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan teks berita tentang politis pendidikan di Indonesia. Analisis data yang digunakan representasi, relasi, dan identitas. Adapaun hasil penelitiannya di dapatkan bahwa politisi pendidikan terjadi karna kurang kompaknya anatar pihak satu dengan yang lain dimana di sini terdapat tiga pihak yang berperan penting yaitu pemerintah, Lembaga pendidikan, dan Masyarakat. Dejalan dengan aliran filsafat pragmatis dimana mendukung kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Kata Kunci: *Politisi, Pendidikan, Filsafat Pragmatis*

Abstract

Education and politics are two important elements in the socio-political system in every country, both developed and developing countries. However, in reality there are many abuses in educational politics by several individuals involved, which has a negative impact on education in Indonesia. To see more about why educational politicians occur in Indonesia, researchers are interested in conducting discourse research to explain more about educational politicians in Indonesia. The data collection method uses news texts about the politics of education in Indonesia. Data analysis uses representation, relationships and identity. As for the results of the research, it was found that educational politics occurs because of a lack of unity between one party and another, where here there are three parties that play an important role, namely the government, educational institutions and society. In line with the pragmatic philosophy which supports collaboration between government, educational institutions and society to achieve better results.

Keywords: *Politicians, Education, Pragmatic Philosophy*

PENDAHULUAN

Pengertian Pendidikan

Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu (Pristiwanti & dkk, 2022). Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (long life education). Pengajaran dalam pengertian luas juga merupakan sebuah proses kegiatan mengajar, dan melaksanakan pembelajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun (Alpian, 2019). Pendidikan pertama kali yang diperoleh setiap insan yaitu di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati atau bisa disebut proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sepertihalnya yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti Pendidikan; "Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya" .

Seperti halnya peranan pendidikan dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mampu bersaing secara sehat tetapi juga memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia meningkat (Halawa & Mulyanti,

2023). Ilmu pendidikan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis karena ilmu tersebut ditujukan kepada paraktek dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didik. Mendidik bukanlah Perbuatan sembarangkarena menyangkut kehidupan dan nasib anak manusia untuk kehidupan selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk yang bermartabat dengan hak-hak asasinya. Itulah sebabnya melaksanakan pendidikan merupakan tugas moral yang tidak ringan.

Pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningaktakan kesejahteraan masyarakat, dan membangun dan membangun martabat bangsa, maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi. Perhatian tersebut antara lain ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang berarti. Serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah terus melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh penmdidikan pada semua jenjang yang ada.

Pengertian Politisi Pendidikan

Politisi pendidikan atau juga dikenal dengan politik pendidikan merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara penyampaianya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu – isu praktis sehari hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian – bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa – apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga – lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik

masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara – Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga – lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya sakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965 : 287), *education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terikat tanpa bias dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*employment*), dan peranan politik kaum cendikia (*the political role of the intelligentsia*). Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai – nilai dan lembaga barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern. Dibanyak Negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat. Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan – keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai – nilai sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik.

Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.

Idealisme Pendidikan

Idealismenya pendidikan dapat dilihat dari tiga sudut pandang di antaranya ontologi, epistemology, dan aksiologi. Ontologi merupakan filsafat pendidikan idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditinjau pada peserta

didik adalah pemahaman sebagai makhluk spritual dan mempunyai kehidupan yang bersifat ontologis dan idealistik. Dengan demikian pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral serta mencitacitakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi (Rusdi, 2013). Sedangkan Epistemologi merupakan filsafat pendidikan idealisme menyatakan bahwa pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan tersebut tidak semata-mata terikat pada hal-hal fisik, tetapi nengutamakan yang bersifat spritual. Sedangkan aspek aksiologi pada idealisme menempatkan nilai pada dataran yang bersifat tetap dan idealistik. Artinya pendidik hendaknya tidak menjadikan peserta didik terombang ambing oleh sesuatu yang bersifat relatif atau temporer (Mubin, 2019).

Realita Pendidikan di Indonesia

Sampai saat ini, realitas politik pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih belum maksimal dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan. Terutama pada jenjang pendidikan dasar, perbaikan kurikulum pendidikan, dan tuntutan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Meskipun pemerintah telah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar, masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Oleh sebab itu pemerintah haru memperhatikan lebih lanjut terkait pendidikan di Indonesia agar tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Adam, 2018) mengatakan bahwa bila ingin pendidikan berkualitas, tentu juga membutuhkan supporting biaya yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa metode analisis wacana kritis. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan perilaku yang diamati dari subjek itu sendiri (Fuchran,1998:11). Sementara itu metode penelitian wacana kritis merupakan salah satu contoh penerapan dari metode kualitatif yang dilakukan secara eksplanatif. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis ini, analisis akan di fokuskan pada aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang terkait dengan aspek tersebut. Konteks disini dapat berarti bahwa aspek kebahasaan tersebut digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Metode pengumpulan data menggunakan teks berita tentang politis pendidikan di Indonesia. Analisis data yang digunakan representasi, relasi, dan identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Terjadi Politisi Pendidikan

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan krisis politis terhadap pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis politis terhadap pendidikan di Indonesia yang terdapat di dalam penelitian (Rizki et al., 2023):

1. Kurangnya Dana Pendidikan: Anggaran pendidikan yang terbatas dapat menjadi sumber krisis politis. Jika pemerintah tidak mengalokasikan cukup dana untuk pendidikan, hal ini dapat memicu protes dan kritik dari berbagai pihak, terutama masyarakat dan pelaku pendidikan.
2. Kualitas Pendidikan yang Rendah: Jika sistem pendidikan tidak mampu memberikan mutu yang baik, termasuk kurikulum yang relevan dan tenaga pendidik yang berkualitas, hal ini dapat menjadi sumber krisis politis. Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat merasa tidak puas dan menuntut perubahan.
3. Ketidaksetaraan dalam Akses Pendidikan: Ketidaksetaraan akses pendidikan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Bila terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok sosial tertentu, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan politis.
4. Korupsi dalam Sistem Pendidikan: Praktik korupsi dalam sistem pendidikan, seperti suap untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi atau pengadaan buku sekolah, dapat menciptakan krisis politis. Masyarakat dapat merasa bahwa korupsi merugikan mereka dan merusak integritas sistem pendidikan.
5. Ketidakstabilan Kepemimpinan: Perubahan kepemimpinan atau kebijakan yang sering dapat menciptakan ketidakpastian dan krisis politis di sektor pendidikan. Perubahan

kebijakan yang mendadak tanpa konsultasi atau partisipasi pihak terkait juga dapat menciptakan ketidakpuasan.

6. Ketidakesesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Pasar Kerja: Jika kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau tidak mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, hal ini dapat menciptakan krisis politis. Masyarakat dan dunia bisnis mungkin akan menuntut perubahan untuk meningkatkan relevansi pendidikan.
7. Ketidakstabilan Politik secara Umum: Faktor-faktor politik yang lebih luas, seperti ketidakstabilan politik dalam pemerintahan atau konflik politik, juga dapat berdampak negatif pada sektor pendidikan. Kondisi politik yang tidak stabil dapat menghambat pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif.

Solusi

Untuk mengatasi politis terhadap pendidikan maka diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak dimana di antaranya seperti pemerintah, Lembaga pendidikan, Masyarakat. Untuk lebih jelas adapun tugas pihak di atas sebagai berikut (Temon Astawa, 2017):

1. Pemerintah

Dalam hal ini langkah yang dapat di ambil pemerintah seperti (1) meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan agar dapat mendukung infrastruktur, fasilitas, dan gaji guru yang layak, (2) Memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium, (3) Memperhatikan kebutuhan khusus pendidikan, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, (4) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dan menegakkan akuntabilitas pada semua tingkatan pemerintahan, (5) Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja sekolah.

2. Lembaga Pendidikan

Dalam hal ini langkah yang dapat di ambil Lembaga pendidikan seperti (1) Menciptakan komitmen politik yang kuat untuk mendukung pendidikan sebagai prioritas nasional, (2) Menyusun kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan konsisten, (3) Memberdayakan guru dengan memberikan insentif yang adil, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan psikososial, (4) Mendorong kolaborasi antara guru dan pihak sekolah untuk meningkatkan atmosfer belajar, (5) Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak dari keluarga miskin, (6) Mereformasi kurikulum untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi, (7) Meningkatkan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan terkini, (8) Memperkuat pelatihan guru dan

mengembangkan standar evaluasi kinerja guru.

3. Masyarakat

Dalam hal ini langkah yang dapat di ambil masyarakat seperti (1) Mendorong partisipasi aktif orang tua, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pendidikan, (2) Menggalakkan program mentoring atau bimbingan bagi siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Analisis Filsafat Pendidikan yang sesuai dengan Solusi

Analisis filsafat pendidikan yang selaras dengan Solusi untuk mengatasi politis terhadap pendidikan salah satunya adalah aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang menekankan pada arti praktis dan kegunaan dalam menentukan nilai suatu ide atau tindakan. Aliran ini berasal dari Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan diwakili oleh pemikir-pemikir seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey (Yunus, 2016). Dalam konteks pendidikan, pendekatan pragmatis mendukung kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan dua elemen yang saling berikatan. Namun pada kenyataannya politis pendidikan banyak terjadi penyelewengan oleh beberapa oknum yang terlibat sehingga berdampak buruk kepada pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi penyelewengan tersebut maka diperlukan dukungan oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah, Lembaga pendidikan, dan Masyarakat. Adapun aliran filsafat yang mendukung keterlibatan pihak dalam mengatasi politisi pendidikan adalah aliran filsafat Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang menekankan pada arti praktis dan kegunaan dalam menentukan nilai suatu ide atau tindakan, Dalam konteks pendidikan, pendekatan pragmatis mendukung kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, B. (2018). PERANAN MANAJEMEN STRATEGI DAN MANAJEMEN OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (Studi kasus di SMPN 13 Depok, Jabar). *Jurnal Tahdzibi*, 3(2), 57–66. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.2.57-66>

- Alpian, Y. (2019). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA. *Jurna Buana Pengabdian*, 8(5), 55.
- Halawa, A. N., & Mulyanti, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 57–64.
- Mubin, A. (2019). Refleksi Pendidikan Filsafat Idealisme. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15(2), 25–39. <https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.1801>
- Pristiwanti, D., & dkk. (2022). *Pengertian Pendidikan*. 4, 1707–1715.
- Rizki, A., Sinuraya, A., Putra, W. S., & Indriani, I. (2023). Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia. *Journal Of International Multidisciplinary Research*.
- Rusdi. (2013). Filsafat Idealisme (Implikasinya dalam Pendidikan). *Jurnal Dinamika Ilmu*, 13(2), 291–306. <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70>
- Temon Astawa, I. N. (2017). Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 197. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>
- Yunus, H. A. (2016). Telaah Aliran Pendidikan Progresivisme Dan Esensialisme Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 2(1). <https://doi.org/10.31949/jcp.v2i1.319>.